

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri Mikro dan Kecil (IMK) merupakan salah satu sektor yang memainkan peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam struktur perekonomian nasional, IMK dikenal sebagai sektor yang memiliki daya tahan tinggi terhadap krisis ekonomi, serta mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Keberadaan industri ini tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan kawasan pinggiran kota, sehingga IMK juga berkontribusi langsung terhadap pengurangan kesenjangan antarwilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata (Jalaliah et al., 2022).

Peran penting IMK tidak hanya terlihat dari kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja, tetapi juga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di sekitar lingkungan usaha. Usaha-usaha kecil seperti pengolahan makanan, kerajinan tangan, tekstil rumahan, dan berbagai jenis industri rumah tangga lainnya menjadi bukti nyata bahwa IMK mampu menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Selain itu, IMK juga mendorong terciptanya kewirausahaan dan inovasi lokal yang berbasis pada kearifan dan potensi daerah (Yunsepa et al., 2022).

Jumlah unit usaha mikro dan kecil di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Data ini menggambarkan bahwa sektor ini memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, baik dari sisi jumlah pelaku usaha, kapasitas produksi, maupun kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Andra, 2023). Perkembangan IKM di Indonesia

dalam lima tahun terakhir dapat dilihat melalui data yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 1 Jumlah Kontribusi Industri Skala Mikro dan Kecil di Indonesia Terhadap PDB Indonesia tahun 2019-2023

Tahun	PDB Indonesia (Triliun Rupiah)	Nilai tambah bruto IKM di Indonesia (Triliun Rupiah)	Persentase Kontribusi IKM Terhadap PDB (%)
2019	15.833,9	9.581,1	60,51
2020	15.434,2	5.757,0	37,30
2021	16.970,8	10.364,1	61,07
2022	19.588,4	11.852,9	60,51
2023	20.892,4	12.744,4	61,00

Sumber: Badan pusat statistik

Sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional, sebagaimana terlihat dari persentase kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang secara umum berada di atas 60% pada periode sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Pada tahun 2019, nilai tambah bruto sektor IKM tercatat sebesar Rp9.581,1 triliun atau 60,51% dari total PDB Indonesia. Namun, pada tahun 2020, dampak pandemi menyebabkan penurunan tajam nilai tambah bruto menjadi Rp5.757,0 triliun, sehingga kontribusinya terhadap PDB merosot ke angka 37,30%. Meski demikian, pada tahun 2021 sektor IKM kembali menunjukkan ketangguhannya dengan nilai tambah bruto meningkat menjadi Rp10.364,1 triliun dan kontribusi melonjak menjadi 61,07%. Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2022 dan 2023, di mana nilai tambah bruto IKM masing-masing mencapai Rp11.852,9 triliun dan Rp12.744,4 triliun, dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 60,51% dan 61,00%. Data ini mencerminkan bahwa sektor IKM tidak hanya memiliki ketahanan yang tinggi dalam menghadapi krisis, tetapi juga mampu berperan sebagai penggerak utama dalam pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional (Putu et al., 2024).

Peranan yang sangatlah penting dimiliki oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau dapat disingkat juga dengan UMKM, dalam struktur perekonomian yang ada di Indonesia. Keberadaan UMKM ini tidak hanya sekedar membawakan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, namun juga menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, khususnya pada beberapa daerah yang mana investasi besar masih belum menjangkaunya (Nurhapsari et al., 2022). Dalam kondisi ekonomi global yang fluktuatif, UMKM terbukti memiliki daya tahan yang relatif kuat karena karakteristiknya yang fleksibel, berbasis lokal, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Peran strategis ini menjadikan UMKM sebagai pilar utama dalam mendorong pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, khususnya di wilayah-wilayah dengan tingkat pembangunan yang masih berkembang (Cahyaningsih & Dewi, 2023).

Kontribusi yang besar dari sektor Industri Mikro dan Kecil (IMK) terhadap PDB Indonesia tentunya tidak terlepas dari keberadaan dan pertumbuhan jumlah unit usaha yang tersebar di berbagai wilayah (Wardani & Murtedjo, 2016). Salah satu indikator penting yang mencerminkan aktivitas sektor ini adalah jumlah perusahaan industri pada skala mikro dan kecil yang terus mengalami dinamika dari tahun ke tahun. Perkembangan ini mencerminkan daya hidup dan partisipasi pelaku usaha dalam menopang perekonomian nasional, terutama di sektor riil berbasis produksi. Maka, tabel di bawah ini menyajikan perkembangan jumlah unit usaha industri mikro dan kecil di Indonesia merupakan wujud dari pertumbuhan sektor tersebut (Mangi et al., 2024).

**Tabel 1. 2 Jumlah Perusahaan Industri Skala Mikro dan Kecil di Indonesia
(unit) tahun 2019-2023**

Tahun	Jumlah Perusahaan Industri Skala Mikro dan Kecil di Indonesia (Unit)		Total unit
	mikro	kecil	
2019	4.132.487	332.418	4.464.905
2020	4.023.612	319.840	4.343.452
2021	3.954.109	308.522	4.262.631
2022	4.104.583	324.910	4.429.493
2023	4.182.205	317.389	4.499.594

Sumber: Badan Pusat Statistik

Data jumlah perusahaan industri skala mikro dan kecil di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren yang cukup dinamis, dengan pola penurunan dan pemulihan yang jelas terlihat. Pada tahun 2019, jumlah total unit IMK tercatat sebanyak 4.464.905 unit. Namun, dampak pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun 2020 menyebabkan penurunan menjadi 4.343.452 unit, dan kembali turun di tahun 2021 menjadi 4.262.631 unit. Penurunan tersebut mencerminkan kondisi usaha yang tidak stabil dan tantangan berat yang dihadapi oleh pelaku industri mikro dan kecil, terutama dalam hal produksi, distribusi, dan permintaan pasar. Mulai tahun 2022, sektor ini mulai menunjukkan pemulihan dengan peningkatan jumlah unit menjadi 4.429.493 unit, dan kembali naik secara signifikan pada tahun 2023 menjadi 4.499.594 unit (Jalaliah et al., 2022).

Peningkatan ini menunjukkan bahwa sektor industri mikro dan kecil di Indonesia memiliki daya lenting (resiliensi) yang tinggi dalam menghadapi tekanan ekonomi, serta kemampuan adaptasi yang kuat terhadap perubahan situasi, termasuk dalam memanfaatkan peluang digitalisasi dan dukungan kebijakan pemerintah (Alifa et al., 2021). Selain itu, tren ini juga mencerminkan pulihnya kepercayaan masyarakat untuk kembali menjalankan usaha dan meningkatnya peran sektor ini sebagai penopang utama perekonomian nasional, khususnya

dalam penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan (Fajrin et al., 2022).

Dalam kaitannya dengan produktivitas industri mikro dan kecil, terdapat sejumlah faktor yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan kinerja sektor ini. Di antaranya adalah persentase modal, bahan baku, pendapatan, pendidikan, dan lama usaha. (Azizah et al., 2025).

Persentase modal merupakan salah satu faktor produksi fundamental yang sangat penting dalam mendukung kelangsungan dan perkembangan Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Indonesia (BPS, 2023). Persentase modal menunjukkan seberapa besar proporsi dana yang dialokasikan pelaku usaha untuk membiayai berbagai kebutuhan produksi, mulai dari pembelian bahan baku, pengadaan peralatan dan teknologi, sewa tempat usaha, hingga biaya operasional lainnya seperti gaji tenaga kerja. Semakin tinggi persentase modal yang dialokasikan secara efektif, maka semakin besar pula kapasitas IMK untuk meningkatkan produksi, menjaga dan meningkatkan kualitas produk, serta melakukan inovasi agar dapat bersaing di pasar yang kompetitif (Handayani, 2023).

Pelaku IMK di Indonesia sering menghadapi kendala keterbatasan persentase modal. Kendala ini umumnya muncul karena akses terhadap lembaga pembiayaan formal masih terbatas, ditambah rendahnya kemampuan pelaku usaha dalam mengelola keuangan secara efisien (Wardani & Murtedjo, 2016). Kondisi ini berdampak langsung pada terbatasnya skala produksi, rendahnya adopsi teknologi, dan pada akhirnya, memengaruhi produktivitas usaha (Mansur & Satriawan, 2023). Tidak semua pelaku usaha IMK berani atau mampu mengakses pinjaman dari lembaga keuangan formal, sebab adanya persyaratan jaminan yang berat, prosedur yang rumit, atau kekhawatiran terhadap beban

bunga pinjaman. Akibatnya, sebagian besar IMK masih bergantung pada modal sendiri atau pinjaman informal dari keluarga dan kerabat, yang secara persentase jumlahnya relatif kecil (Kumbadewi et al., 2021).

Keterbatasan modal ini tidak hanya menghambat ekspansi, tetapi juga memengaruhi kemampuan IMK untuk bertahan dalam situasi ekonomi yang tidak menentu (Febianti et al., 2023). Fluktuasi harga bahan baku, perubahan daya beli masyarakat, atau bahkan disrupsi pasar, dapat menjadi ancaman serius bagi IMK dengan modal terbatas (Fortuna et al., 2022). Oleh karena itu, dalam analisis produktivitas IMK secara nasional, persentase modal memiliki pengaruh langsung terhadap jumlah output yang mampu dihasilkan oleh pelaku usaha. Semakin besar persentase modal yang dialokasikan dan dikelola secara optimal, semakin besar peluang IMK untuk meningkatkan volume produksi, berinvestasi pada kualitas, serta memperluas pangsa pasar, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas mereka (Kussoy et al., 2021). Penelitian ini akan mengkaji secara empiris bagaimana dimensi modal yang beragam tersebut berkontribusi pada produktivitas IMK di seluruh Indonesia.

Selain persentase modal, faktor lain yang tidak kalah penting dalam proses produksi Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Indonesia adalah biaya bahan baku. Setelah pelaku usaha memperoleh modal yang cukup untuk memulai atau mengembangkan usahanya, alokasi biaya untuk bahan baku menjadi penentu vital dalam kelancaran proses produksi (Sarajar et al., 2025).

Biaya bahan baku merupakan salah satu faktor produksi yang sangat krusial dalam menentukan kapasitas dan efisiensi produksi, terutama pada IMK yang umumnya masih menggunakan metode produksi konvensional dan padat karya (Keiku et al., 2020). Dalam konteks IMK di Indonesia, sebagian besar pelaku

usaha masih sangat bergantung pada pengeluaran bahan baku dalam berbagai tahapan proses produksi (Statistik, 2025). Mulai dari persiapan bahan, pengolahan, hingga pengemasan produk, porsi biaya bahan baku seringkali menjadi komponen terbesar dari total biaya produksi. Semakin besar biaya yang dapat dialokasikan untuk bahan baku secara optimal, maka semakin tinggi pula kapasitas produksi yang dapat dicapai oleh IMK. Sebaliknya, keterbatasan biaya bahan baku dapat membatasi produktivitas, memperlambat proses produksi, dan bahkan menurunkan kemampuan industri untuk memenuhi permintaan pasar secara tepat waktu (Niharotul Faizah et al., 2024).

Menurut (Niharotul Faizah et al., 2024), bahan baku dalam konteks produksi dapat dipahami sebagai input utama yang harus dikelola secara tepat untuk menghasilkan barang atau jasa. Dalam hal ini, bukan hanya jumlah biaya yang dikeluarkan, tetapi juga efisiensi dalam penggunaannya akan sangat berpengaruh terhadap output yang dihasilkan. Usaha IMK yang mampu mengalokasikan biaya bahan baku dengan tepat cenderung memiliki daya saing lebih baik dibandingkan usaha yang pengeluaran bahan bakunya tidak terkontrol atau kurang efisien.

Menurut (Fajri et al., 2022) lebih lanjut menjelaskan bahwa efisiensi dapat tercapai apabila biaya bahan baku yang dikeluarkan benar-benar sebanding dengan output yang dihasilkan. Dengan demikian, dalam penelitian ini, biaya bahan baku akan dianalisis untuk melihat sejauh mana kontribusinya terhadap tingkat produktivitas dan efisiensi yang dicapai oleh pelaku IMK di seluruh Indonesia. Analisis ini mempertimbangkan bagaimana besarnya biaya yang dialokasikan untuk bahan baku memengaruhi kapasitas produksi, serta

bagaimana pengelolaan biaya tersebut dapat meningkatkan daya saing IMK (Sarajar et al., 2025).

faktor lain yang berperan penting dalam menentukan produktivitas Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Indonesia adalah pendapatan. Pendapatan dalam konteks usaha diartikan sebagai penerimaan bersih yang diperoleh pelaku usaha dari hasil penjualan produk setelah dikurangi biaya-biaya produksi, dan umumnya diukur dalam bentuk rupiah (BPS, 2023). Dengan kata lain, pendapatan mencerminkan kemampuan IMK dalam mengelola faktor-faktor produksi yang ada menjadi output yang bernilai ekonomi.

Tingkat pendapatan usaha memiliki peran yang sangat vital. Pendapatan yang tinggi memungkinkan pelaku IMK untuk menutupi biaya operasional, menambah kapasitas produksi, meningkatkan kualitas produk, hingga melakukan inovasi untuk memperluas pangsa pasar. Selain itu, pendapatan juga menjadi sumber utama bagi pelaku usaha dalam memperbaiki kesejahteraan keluarga, meningkatkan daya beli, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Sebaliknya, pendapatan yang rendah dapat membatasi ruang gerak pelaku usaha, menurunkan motivasi berusaha, bahkan meningkatkan risiko kegagalan usaha (Mulyani & Sari, 2022).

Dalam praktiknya, pendapatan IMK sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain stabilitas harga bahan baku, tingkat permintaan pasar, kemampuan promosi, serta daya beli masyarakat. Fluktuasi harga bahan baku sering kali memengaruhi margin keuntungan, sehingga meskipun volume penjualan meningkat, pendapatan bersih tidak selalu bertambah (Putri & Rahmawati, 2021). Di sisi lain, keterbatasan akses terhadap pasar yang lebih luas juga membuat pendapatan IMK cenderung stagnan. Hal ini terutama terjadi pada

usaha kecil yang masih mengandalkan penjualan di lingkungan lokal tanpa strategi pemasaran digital atau jaringan distribusi yang memadai.

Menurut Yuliana et al. (2020), pendapatan usaha tidak hanya berfungsi sebagai hasil akhir dari kegiatan produksi, tetapi juga sebagai tolok ukur keberlanjutan usaha. IMK dengan pendapatan yang stabil dapat lebih mudah menyusun perencanaan jangka panjang, misalnya untuk melakukan investasi dalam peralatan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, atau membuka cabang usaha baru. Sebaliknya, pendapatan yang fluktuatif atau cenderung rendah dapat meningkatkan kerentanan usaha, menghambat investasi, dan berujung pada penurunan produktivitas.

Dalam konteks penelitian ini, pendapatan dianalisis berdasarkan jumlah rupiah yang diperoleh pelaku IMK dari kegiatan produksi dan penjualan. Semakin tinggi pendapatan yang dicapai, semakin besar pula kemampuan pelaku usaha untuk meningkatkan skala produksi, menjaga kelancaran operasional, serta memperkuat daya saing. Oleh karena itu, pendapatan menjadi salah satu variabel penting yang mencerminkan efektivitas pengelolaan sumber daya dan sekaligus faktor penentu produktivitas IMK di Indonesia (BPS, 2023; Mulyani & Sari, 2022; Yuliana et al., 2020).

Selain modal, bahan baku, pendapatan, tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor krusial yang dapat memengaruhi produktivitas Industri Mikro dan Kecil (IMK). Berdasarkan (Tewal et al., 2019), rendahnya kualitas SDM dalam IMK di Indonesia sering kali disebabkan oleh minimnya pendidikan yang dimiliki oleh pelaku usaha dan karyawannya. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya kinerja bisnis secara keseluruhan, termasuk aspek produksi. Jika SDM memiliki kualitas yang baik, yang dapat dicerminkan

dari tingkat pendidikan, maka diharapkan dapat meningkatkan kinerja IMK, baik dari aspek produktivitas maupun daya saing (Solow, 1967).

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin luas pula wawasan dan keterampilannya dalam mengelola usaha. Pelaku usaha dengan pendidikan yang baik cenderung lebih mudah memahami berbagai konsep esensial dalam menjalankan bisnis (Keiku et al., 2020). Ini termasuk kemampuan dalam merencanakan dan mengimplementasikan manajemen produksi yang efisien, strategi pemasaran yang efektif, pengelolaan keuangan yang profesional, serta adopsi dan pemanfaatan teknologi dalam operasional bisnis. Semua aspek ini secara kolektif berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha. Dengan demikian, pelaku usaha IMK yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi umumnya mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, meningkatkan daya saing produk atau jasa mereka, dan pada akhirnya mampu mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang memiliki tingkat pendidikan lebih rendah (Andra, 2023).

Dengan tingkat pendidikan yang memadai, pelaku usaha cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik dalam mengelola usaha secara profesional. Ini mencakup kemampuan dalam menyusun perencanaan keuangan yang matang dan pengelolaan modal yang efektif, yang sebelumnya telah dibahas sebagai faktor penting (Nurhapsari et al., 2022). Pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan juga dapat membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai sumber modal formal, karena mereka mungkin lebih memahami prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan. Oleh karena itu, variabel pendidikan perlu dianalisis secara mendalam untuk memahami kontribusinya terhadap peningkatan produktivitas IMK di Indonesia (Febianti et al., 2023).

Salah satu faktor yang turut memengaruhi tingkat produktivitas dalam kegiatan industri mikro dan kecil adalah lama usaha, yaitu jangka waktu suatu unit usaha telah beroperasi. Lama usaha dapat menjadi cerminan dari tingkat pengalaman pelaku usaha dalam menjalankan proses produksi, mengelola sumber daya, serta menyesuaikan diri dengan dinamika pasar dan kebijakan ekonomi. Semakin lama suatu usaha beroperasi, maka diasumsikan semakin tinggi pula pengetahuan praktis yang dimiliki dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Industri mikro dan kecil di Indonesia, pelaku usaha dengan durasi usaha yang panjang umumnya telah memiliki pola kerja yang stabil, pelanggan yang loyal, dan jaringan usaha yang lebih mapan. Mereka juga cenderung lebih siap dalam menghadapi tantangan seperti perubahan harga bahan baku, persaingan pasar, atau krisis ekonomi, dibandingkan dengan usaha yang baru berdiri. Dengan akumulasi pengalaman tersebut, pelaku usaha dapat lebih efektif dalam mengatur strategi produksi, menghindari kesalahan berulang, serta mengembangkan inovasi sederhana yang relevan dengan sumber daya yang dimiliki.

Namun, tidak semua usaha dengan usia yang panjang menunjukkan tingkat produktivitas yang tinggi. Beberapa usaha yang telah berjalan lama justru stagnan karena tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, selera pasar, atau tidak mendapat pelatihan dan pendampingan yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih lanjut sejauh mana lama usaha berpengaruh terhadap produktivitas industri mikro dan kecil di Indonesia, bersama dengan faktor-faktor lainnya seperti modal, tenaga kerja, bahan baku, pendidikan, dan pelatihan kerja, agar dapat dirumuskan strategi peningkatan produktivitas yang tepat sasaran.

Oleh karena itu, perhatian yang lebih besar terhadap faktor-faktor produksi seperti persentase modal, bahan baku, pendapatan, pendidikan dan lama usaha menjadi sangat esensial dalam mendorong peningkatan produktivitas Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Indonesia. Kelima faktor tersebut berperan langsung dan interdependen dalam menentukan kapabilitas pelaku usaha untuk menjalankan proses produksi secara maksimal dan efisien (Mangi et al., 2024). Persentase modal yang memadai memungkinkan pelaku usaha mengalokasikan dana secara proporsional baik untuk pembelian bahan baku, perawatan peralatan, maupun investasi teknologi yang menunjang peningkatan efisiensi. Bahan baku yang tersedia dalam jumlah cukup, harga terjangkau, dan kualitas konsisten akan menjamin kelancaran proses produksi serta menjaga mutu produk akhir (Fajrin et al., 2022). pendapatan yang diperoleh bukan hanya menjadi indikator keberhasilan usaha, tetapi juga menentukan kemampuan pelaku usaha untuk melakukan reinvestasi sehingga produktivitas dapat terus meningkat. Faktor pendidikan turut memengaruhi kemampuan manajerial, pemanfaatan teknologi, serta kapasitas inovasi pelaku usaha dalam menghadapi dinamika pasar. Sementara itu, lama usaha seringkali berkorelasi positif dengan akumulasi pengalaman, penguasaan jaringan pemasaran, dan stabilitas bisnis dalam jangka panjang. Dengan demikian, kombinasi kelima faktor tersebut secara simultan dapat memperkuat daya saing IMK sekaligus meningkatkan produktivitasnya (Azizah et al., 2025).

Fenomena ini menjadi semakin krusial mengingat IMK merupakan tulang punggung perekonomian nasional Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor dan wilayah (Suprihartini et al., 2023). Peningkatan produktivitas pada sektor IMK tidak hanya akan berdampak pada peningkatan skala produksi dan

daya saing mereka di pasar domestik maupun global, tetapi juga berkontribusi substansial terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, penciptaan lapangan kerja yang lebih luas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif (Tewal et al., 2019). Dengan demikian, pemahaman mendalam secara empiris terhadap pengaruh masing-masing faktor produksi terhadap produktivitas IMK menjadi langkah awal yang strategis dalam perumusan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan IMK yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini mengidentifikasi beberapa permasalahan krusial terkait produktivitas Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Indonesia. Meskipun IMK memiliki peran vital dalam perekonomian nasional, berbagai tantangan dalam pengelolaan faktor-faktor produksi seringkali menghambat optimalisasi produktivitas mereka. Untuk menganalisis fenomena ini secara komprehensif, penelitian ini bertujuan untuk menjawab serangkaian pertanyaan kunci mengenai pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap produktivitas IMK. Akan dianalisis secara terpisah bagaimana persentase modal, bahan baku, pendapatan, pendidikan dan lama usaha memengaruhi produktivitas Industri Mikro dan Kecil di Indonesia. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan secara simultan menguji apakah kelima variabel tersebut berupa persentase modal, bahan baku, pendapatan, pendidikan dan lama usaha secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas Industri Mikro dan Kecil di Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana persentase modal, bahan baku, pendapatan, pendidikan dan lama usaha memengaruhi produktivitas Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini akan mengkaji pengaruh masing-masing variabel tersebut secara parsial, serta menganalisis pengaruh simultan dari seluruh variabel independen tersebut terhadap produktivitas IMK di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mengenai analisis pengaruh faktor-faktor produksi, yaitu persentase modal, bahan baku, pendapatan, pendidikan dan lama usaha terhadap produktivitas Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Indonesia, diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi pembangunan dan ekonomi industri. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori-teori mengenai faktor-faktor produksi yang memengaruhi produktivitas IMK, serta memberikan referensi empiris tentang bagaimana persentase modal, bahan baku, pendapatan, pendidikan dan lama usaha berperan dalam menentukan tingkat produktivitas IMK di konteks Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk studi selanjutnya yang ingin mengkaji pengembangan sektor IMK di tingkat nasional maupun regional.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak. Bagi para pelaku Industri Mikro dan Kecil,

temuan ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan faktor-faktor produksi secara lebih optimal untuk meningkatkan produktivitas usaha mereka. Bagi pemerintah, khususnya kementerian atau lembaga terkait pengembangan IMK, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga dalam perumusan kebijakan atau program pembinaan dan pengembangan IMK yang lebih efektif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan pelaku usaha IMK di seluruh Indonesia secara berkelanjutan.